



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2019  
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN RI

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS		
3.	KABAR BANTEN		

JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2019
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

# Dewan Bongkar RAPBD Banten

Belanja Daerah Bertambah Rp180 M

**BONGKAR PASANG RAPBD 2020**

SERANG-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten melakukan bongkar pasang terhadap komposisi rancangan APBD 2020 yang diusulkan Gubernur Banten Wahidin Halim. Hasilnya, ada penambahan anggaran belanja daerah sebesar Rp180 miliar.

► Ke halaman 7

**OPD YANG DIPANGKAS**

- Dindikbud
- Disnakertrans

**USULAN GUBERNUR**

RAPBD 2020	Rp13,03 triliun
Belanja Tidak Langsung	Rp8,12 triliun
Belanja Langsung	Rp4,90 triliun
Pendapatan Daerah	Rp12,42 triliun

**PEMBAHASAN BANGGAR DAN TAPD**

Belanja Daerah Bertambah	Rp180,7 miliar
Komposisi RAPBD 2020 Menjadi	Rp13,2 triliun
Belanja Langsung Menjadi	Rp4,97 triliun

**OPD YANG MENDAPAT PENAMBAHAN ANGGARAN**

- Dinas Pariwisata
- Dinas Perhubungan
- Dinas Sosial
- Diskominfotiksan
- BPKAD
- Bapenda
- DP3AKKB
- DLHK

## Dewan Bongkar...

Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan akhir antara Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Banten di ruang rapat pendopo lama gubernur, Kota Serang, Rabu (6/11).

Pantauan *Radar Banten*, rapat yang diagendakan pukul 14.00 WIB molor hingga dua jam. Rapat baru dimulai sore diawali paparan dari TAPD menindaklanjuti nota komisi-komisi di DPRD Banten yang telah disampaikan pekan lalu. Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Banten Andra Soni berlangsung tertutup. Awak media hanya bisa menunggu di luar ruang rapat.

Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun *Radar Banten*, komposisi RAPBD Banten tahun anggaran 2020 mengalami perubahan. Mayoritas slot anggaran OPD mengalami penambahan anggaran, khususnya Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Sosial (Dinsos). Meski begitu, ada beberapa OPD yang anggarannya dipangkas di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Ketua Harian Banggar DPRD Banten Muhlis mengungkapkan, pembahasan RAPBD 2020 sudah memasuki tahap

akhir. Namun, nanti komposisi pastinya akan disepakati melalui rapat finalisasi.

"Pembahasan hari ini (kemarin-red) banyak angka yang berubah. Namun, akan didalami lagi melalui pendapat akhir komisi dan fraksi," ujar Muhlis kepada wartawan saat jeda pembahasan RAPBD 2020.

Ia menambahkan, perubahan postur anggaran tidak hanya terjadi pada slot anggaran OPD, tapi juga slot yang lain. Di antaranya anggaran bantuan keuangan kabupaten kota. "Ada tambahan sekira Rp70 miliar dari usulan gubernur sebesar Rp365 miliar," ungkapnya.

Selain melakukan penambahan anggaran, Muhlis mengaku, anggota Banggar juga mengusulkan pemangkasan anggaran pada kegiatan yang dianggap tidak terlalu penting. "Meskipun secara umum komposisi RAPBD bertambah, tetapi upaya efisiensi tetap dilakukan. Beberapa anggaran OPD ada yang dipangkas," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said membenarkan, rapat Banggar dengan TAPD telah menghasilkan kesepakatan terkait postur RAPBD 2020, ada tambahan anggaran lebih dari Rp180 miliar. "Kesepakatan awal sudah ada, tinggal proses finalisasi, yaitu pleno penyampaian akhir fraksi-fraksi," ujarnya.

Secara terperinci, lanjut Nawa, komposisi akhir RAPBD 2020 akan disempurnakan paling cepat hari ini.

### Dari hlm 1

"Kesepakatan kan sudah ada, tinggal penyempurnaannya saja," katanya.

Ketua DPRD Banten Andra Soni memastikan bila rapat finalisasi akan dilakukan di DPRD Banten. "Finalisasinya besok (hari ini-red) di DPRD Banten," tegasnya.

Ia menambahkan, kesepakatan awal Banggar dengan TAPD masih bisa berubah. "Kalau belum final, masih bisa berubah," tutur Andra.

### DINAMIS

Terkait perubahan postur RAPBD 2020, Sekda Banten Al Muktabar mengaku, belum bisa memastikan angka-angkanya. Menurutnya, pembahasan lebih dalam akan terus dilakukan bersama DPRD Banten.

"Masih dinamis, kita prinsipnya sepatutnya dengan tahapan pembahasan di Dewan," paparnya.

Al juga enggan menanggapi ada pemangkasan anggaran pada sejumlah OPD. "Itu nanti kita lihat di akhir," ujarnya.

Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Banten. Pembahasan RAPBD Banten sudah harus rampung pertengahan November 2019. "Sesuai jadwal Bamus, rapat paripurna RAPBD 2020 dilaksanakan 19 November. Setelah rapat finalisasi di Dewan, selanjutnya TAPD akan melakukan penelitian kembali sebelum dipaparkan," kata Sekretaris DPRD Banten Deni Hermawan. (den/alt/ira)